

Jurnal Bisnis Indonesia (JBI)
Edisi Khusus Pengabdian Masyarakat

STRATEGI PEMBERDAYAAN UMKM DI PEDESAAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI ERA INDUSTRI 4.0 MENUJU ERA SOCIETY 5.0

Rusdi Hidayat N¹, Sonja Andarini²

Program Studi Ilmu Administrasi Binsis UPN "Veteran" Jawa Timur, Surabaya ,
Indonesia^{1,2}

Email Korespondensi : rusdi_hidayat.adbis@upnjatim.ac.id

Abstracts

To overcome poverty in rural areas, namely by carrying out community empowerment to be independent, competitive and able to compete in the 4.0 industrial revolution era or the digital era and potentially contribute to national income. The presence of the industrial revolution 4.0 caused the impact of intense competition, MSMEs must be able to overcome these challenges creatively, product innovation, marketing, product packaging, human resource development and technology. In empowering MSMEs, a strategy for preparing economic empowerment in MSMEs is needed in the face of the era of the Industrial Revolution 4.0. The MSME empowerment strategy can be pursued through the Government's role in issuing fiscal and non-fiscal policies, the role of universities in carrying out services to educate and prosper the community, and the role of stakeholders encouraging MSMEs to become more independent and innovative

Keywords: Strategy, Empowerment, UMKM, local wisdom

Abstrak

Untuk menanggulangi kemiskinan di Pedesaan yaitu dengan melaksanakan pemberdayaan masyarakat agar bisa mandiri, kompetitif dan mampu bersaing di era revolusi industri 4.0 atau era digital serta berpotensi menyumbang pendapatan nasional. Hadirnya revolusi industri 4.0 menimbulkan dampak persaingan yang ketat, UMKM harus mampu mengatasi tantangan itu dengan kreatif, inovasi produk, pemasaran, kemasan produk, pengembangan sumber daya manusia dan Teknologi. Dalam pemberdayaan UMKM diperlukan strategi penyiapan pemberdayaan ekonomi pada UMKM dalam menghadapi era revolusi Industri 4.0. Strategi pemberdayaan UMKM dapat ditempuh melalui peran Pemerintah mengeluarkan kebijakan fiskal maupun non fiskal, Peran perguruan tinggi dalam melaksanakan pengabdian untuk mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat, dan Peran stekholder mendorong UMKM semakin mandiri dan inovatif

Kata kunci : Strategi, Pemberdayaan, UMKM, kearifan lokal

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah masalah utama dalam pembangunan nasional dan kemiskinan kebanyakan berasal dari pedesaan. Untuk menanggulangi kemiskinan di Pedesaan yaitu dengan melaksanakan pemberdayaan masyarakat agar bisa mandiri, kompetitif dan mampu bersaing di era revolusi industri 4.0 atau era digital serta berpotensi menyumbang pendapatan nasional. Era revolusi industri telah dirasakan saat ini perangkat teknologi begitu cepat perkembangannya dengan kehadiran revolusi industri 4.0 dimana konektivitas manusia, data, dan mesin dalam bentuk virtual semua terhubung dengan digital dan Kemajuan Teknologi informasi juga menyebabkan perubahan-perubahan cepat dalam berbagai bidang kehidupan, terutama ilmu dan teknologi, globalisasi ini melibatkan semua negara, baik negara maju maupun negara yang sedang berkembang. Bahkan telah menciptakan dunia yang semakin terbuka dan saling ketergantungan antarnegara dan antarbangsa. (Hidayat N, 2017)

Hadirnya revolusi industri 4.0 akan memberikan tantangan dan peluang kepada UMKM di pedesaan. Pandangan selama ini Keberadaan UMKM merupakan usaha kecil yang tidak diragukan mampu bertahan dari goncangan krisis ekonomi dan berkontribusi kepada pembangunan nasional. Menurut laporan Ekonomi mingguan

dari Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi sektor UMKM telah memberikan kontribusi sebesar 59,84% terhadap PDB di tahun 2016 dan meningkat menjadi 60% di tahun 2017. UKM mencatat telah terjadi peningkatan sebesar 2,06% atau 1,2 juta unit usaha dari 61,7 juta unit usaha di tahun 2016 menjadi 62,9 unit usaha di tahun 2017. sektor UMKM berhasil menyerap tenaga kerja hingga 116,6 juta orang atau sebesar 97,02% di tahun 2017. (Adithya Prabowo, 2019)

Kehadiran revolusi industri 4.0 dan society 5.0 diharapkan memberikan nilai positif bagi UMKM dapat berkembang secara mandiri dan pemberdayaan oleh Pemerintah, Perguruan Tinggi, LSM dan Masyarakat umum. Kemudahan teknologi digital di revolusi industri dapat dimanfaatkan oleh masyarakat mengembangkan kegiatan UMKM yang terjadi di pedesaan jauh dari perkotaan tidak tersentuh dengan infrastruktur teknologi Komunikasi. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika mencanangkan Rencana Strategis 2015-2019 berupa konektivitas Broadband Nasional salah satunya Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kawasan (SIDEKA) ke 1000 desa. Diharapkan wilayah pedesaan dapat terjangkau teknologi komunikasi sehingga revolusi industri 4.0 memberikan peluang pengembangan UMKM serta mengembangkan potensi di desa terutama kearifan lokal. Hadirnya revolusi industri 4.0 menimbulkan

dampak persaingan yang ketat, UMKM harus mampu mengatasi tantangan itu dengan kreatif, inovasi produk, pemasaran, kemasan produk, pengembangan sumber daya manusia dan Teknologi. Kemajuan informasi juga menyebabkan perubahan-perubahan cepat dalam berbagai bidang kehidupan, terutama ilmu dan teknologi. Uraian di atas telah dijelaskan bahwa globalisasi ini melibatkan semua negara, baik negara maju maupun negara yang sedang berkembang. Bahkan telah menciptakan dunia yang semakin terbuka dan saling ketergantungan antarnegara dan antarbangsa. Dalam pemberdayaan UMKM diperlukan strategi penyiapan pemberdayaan ekonomi pada UMKM dalam menghadapi era revolusi Industri 4.0.

TINJAUAN PUSTAKA

Manajemen Strategi

Adapun definisi strategi, Solihin (2009) mendefinisikan strategi sebagai suatu proses perencanaan dengan menetapkan cara agar perusahaan atau organisasi dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, proses perencanaan akan mencakup didalamnya proses pembuatan tujuan (*goal making process*) maupun proses pembuatan strategi (*strategy making process*). Sedangkan pengertian Manajemen Strategis sendiri, didefinisikan oleh Fred R. David (2009) dalam bukunya yang berjudul Konsep Manajemen Strategis (sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia) sebagai seni dan

pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuannya. Sesuai dengan definisi tersebut, manajemen strategis berfokus pada usaha untuk mengintegrasikan manajemen, pemasaran, keuangan/akuntansi, produksi/organisasi, penelitian dan pengembangan, serta sistem informasi baik manual maupun komputerisasi untuk mencapai keberhasilan organisasional.

Sedangkan Manajemen strategik adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen strategis meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi (perencanaan strategis dan perencanaan jangka panjang), implementasi strategi, dan evaluasi serta pengendalian. Manajemen strategis menekankan pada pengamatan dan evaluasi peluang dan ancaman lingkungan dengan melihat kekuatan dan kelemahan perusahaan. (Wheelen dan Hunger, 2001)

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat menurut Undang-undang RI No. 6 Tahun 2014 tentang desa adalah pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa .

Sedangkan menurut pendapat Sumardjo (2019) Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah suatu proses pengembangan potensi dan kemampuan individu/ masyarakat sehingga menguat kapasitasnya, untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui kegiatan pembelajaran/ pendidikan dan usaha-usaha lain (misalnya membantu penyediaan fasilitas tertentu), yang bertujuan meningkatkan kemampuan dan kemauan mereka bertindak mengatasi masalah dan ancaman yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan belajar adalah usaha aktif seseorang yang bertujuan mengembangkan wawasan, pengetahuan, keterampilan dan sikap mental yang berdampak tumbuhnya kemampuan bertindak cerdas dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya.

Pemberdayaan masyarakat berasal dari istilah keberdayaan dalam konteks masyarakat ialah kemampuan seseorang yang berada dimasyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat bersangkutan. Keberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan bertahan dan mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Memberdayakan masyarakat adalah usaha meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak bisa melepaskan diri dari keterbelakangan dan kemiskinan. Dalam kondisi tertentu masyarakat

tidak bisa membangun sendiri keberdayaannya harus di dorong oleh stimuli dari luar.(Wrihatnolo & Riant nugroho Dwidjowijoto, 2007)

Ada juga yang memahami pemberdayaan secara makro sebagai upaya mengurangi ketidakmerataan dengan memperluas kemampuan manusia (melalui, misalnya, pendidikan dasar umum dan pemeliharaan kesehatan, bersama dengan perencanaan yang cukup memadai bagi perlindungan masyarakat) dan memperbaiki distribusi modal-modal yang nyata (misal lahan dan akses terhadap modal).

Pemberdayaan Menurut (Eko, 2002) adalah:

1. Suatu upaya atau proses pembangunan yang berkesinambungan, yang berarti dilaksanakan secara terorganisir, dan bertahap dimulai dari tahap permulaan hingga tahap kegiatan tindak- lanjut dan evaluasi (follow-up activity and evaluation).
2. Suatu upaya atau proses memperbaiki (to improve) kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan masyarakat untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik.
3. Suatu upaya atau proses menggali dan memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, sehingga prinsip to help the community to help themselves dapat menjadi kenyataan.
4. Suatu upaya atau proses memandirikan masyarakat, dengan cara menggalang partisipasi aktif dalam masyarakat berupa bentuk aksi

bersama (group action) di dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan pemberdayaan masyarakat hakekatnya memenuhi kesejahteraan bidang sosial, ekonomi dan kebudayaan serta masyarakat bisa mandiri untuk memenuhi kebutuhannya.

Selanjutnya (Rahman Mulyawan, 2012) Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses motivasi dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan otonomi pengambilan keputusan dari kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, melalui partisipasi, demokratisasi, pembelajaran dan pengalaman sosial serta tujuan berupa upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan sehingga rakyat, organisasi dan komunitas mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya.

Pemberdayaan masyarakat (Empowerment) erat hubungannya dengan pambangunan masyarakat (Community Development), seperti yang disampaikan (Ronald J. Hustedde, 2009) dalam pambangunan masyarakat ada 7 hal:

(1) Relationships (hubungan) terkait dengan solidaritas, membangun hubungan sosial, organisasi ataupun kelompok.

(2) Struktur yang mengacu pada praktik sosial, organisasi, atau kelompok yang berperan dalam

solidaritas dan pengembangan kapasitas.

(3) Power (Kekuasaan)

Kekuasaan yang mengacu pada hubungan dengan orang dengan mengendalikan sumber daya, seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan pengetahuan, atau yang memiliki akses lebih besar.

(4) Shared meaning (Makna bersama)

Mengacu pada makna sosial, khususnya simbol, yang orang berikan ke tempat lain, hal-hal fisik, perilaku, peristiwa, atau tindakan. Intinya, solidaritas harus dibangun dalam konteks budaya.

(5) Communication for change,

Komunikasi untuk perubahan terkait dengan konsep partisipasi penuh, nilai yang konsisten dalam pengembangan masyarakat

(6) motivations for decision making

Motivasi dapat mempengaruhi banyak aspek pengembangan masyarakat.

(7) Hubungan terkait dengan rasa solidaritas.

Struktur mengacu pada praktik sosial, organisasi, atau kelompok yang berperan dalam solidaritas dan pengembangan kapasitas.

Pengertian Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Definisi UMKM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 pengertian UMKM adalah Usaha mikro, merupakan usaha yang Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan; atau Memiliki hasil penjualan per tahun paling banyak Rp.

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan Usaha kecil, merupakan usaha produktif yang berdiri sendiri, yang Mempunyai kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan; atau Mempunyai hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), Sementara Usaha Menengah, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) sampai dengan yang paling banyak Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan, atau :Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (Dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (Lima puluh milyar rupiah).

Kearifan Lokal

Kearifan lokal muncul dari istilah budaya lokal adalah suatu cara hidup yang berkembang, dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi. **Budaya** terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Local wisdom dalam bahasa Indonesia Kearifan lokal/

kebijakan setempat, nilai-nilai budaya yang dimiliki masyarakat lokal (indigenous community) dan tradisi yang dimiliki masyarakat setempat.

Berdasarkan pendapat Antariksa (2009), kearifan lokal merupakan unsur bagian dari tradisi-budaya masyarakat suatu bangsa, yang muncul menjadi bagian-bagian yang ditempatkan pada tatanan fisik bangunan (arsitektur) dan kawasan (perkotaan) dalam geografi kenusantaraan sebuah bangsa. Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Menurut (Tumanggor, 2007)Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pe- menuhan kebutuhan mereka.

Kearifan lokal dapat dipahami sebagai nilai yang dianggap baik dan benar sehingga dapat bertahan dalam waktu yang lama dan melembaga. Dalam kehidupan tradisi-adat manusia terdapat pula suatu kearifan adat, yakni nilai-nilai yang spesifik menjunjung adat dan tradisi di suatu wilayah tertentu. Kearifan adat dipahami sebagai segala sesuatu yang didasari pengetahuan dan diakui akal serta dianggap baik oleh ketentuan agama. Pergerakan secara alamiah terjadi secara sukarela karena

dianggap baik atau mengandung kebaikan.(Piutanti, 2015)

Pemberdayaan Kearifan Lokal

Kearifan lokal adalah unsur bagian dari tradisi budaya masyarakat suatu bangsa berupa pandangan hidup dan ilmu pengetahuan. Dari definisi diatas dapat dijelaskan Pemberdayaan kearifan lokal suatu upaya atau proses menggali dan memanfaatkan potensi-potensi dimiliki masyarakat berupa tradisi budaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Misalnya tradisi di Jawa kebiasaan memproduksi batik dan upacara adat Dijelaskan menurut (Tumanggor, 2007) komponen-komponen penting dalam upaya pemberdayaan kearifan lokal, sebagai berikut:

- a. Memanfaatkan idea , pranata dan aktivitas sosial dan peralatan hidup
- b. Idea, pranata dan aktivitas sosial serta peralatan hidup dimaksud mencakup tujuh budaya universal
- c. Pengedepanan Tokoh Masyarakat (Local Genius) dan Warga masyarakat (Community Members) .
- d. Memberi bimbingan kepada masyarakat dalam menganalisa need assesment, pembuatan program dan anggarannya, dan penyusunan proposal pengajuan pendataan dan pembangunan masyarakat..
- e. Mendampingi pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan KAT dan berpartisipasi dalam diskusi-diskusi solusimasalah yang dihadapi .
- f. Mewaspadai kemandekan dengan menugaskan konsultan dan community organizer dari masyarakat lokal

sebagai pembantu dan supervisor dalam upaya kontinuitas pemberdayaan tersebut.

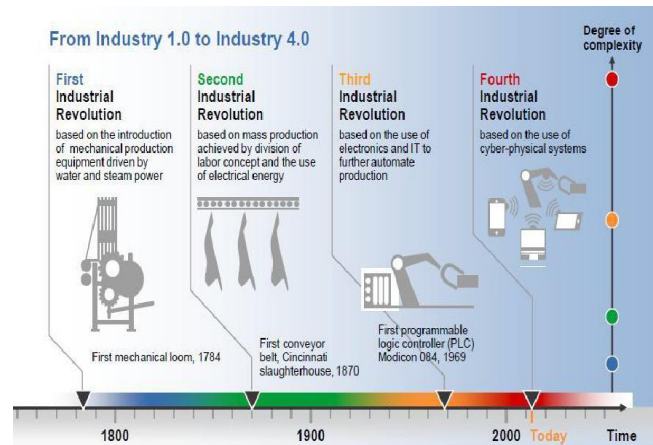
g. Memperkuat dan mengembangkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam perubahan yang diperlukan: kesepakatan dan persetujuan masyarakat.

h. Menugas belajarkan putra-putri tercerdas setempat ke luar daerah secara proporsional,

i. Perlindungan dan penguatan perlindungan hukum atas hak komunal tempat mereka hidup dan berusaha memenuhi kebutuhannya.

Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0

Apa yang dimaksud dengan industri 4.0 adalah suatu situasi kerja di mana manufaktur terhubung secara digital yang ditopang oleh empat unsur, yaitu *internet of things*, *big data*, *cloud computing*, dan *artificial intelligence*. Digitalisasi juga merambah industri-industri lain. Peran-peran produksi yang selama ini dikerjakan oleh tenaga manusia di era industri 4.0 akan digantikan oleh program-program digital sehingga banyak sektor pekerjaan yang hilang. Mesin-mesin pintar akan menggantikan banyak pekerjaan manusia, tidak hanya pekerjaan yang bersifat repetitif seperti halnya di pabrik-pabrik tetapi juga beragam profesi non-repetitif seperti akuntan, analis keuangan, konsultan, dokter, penerjemah, arsitek, pustakawan, telemarketer, kasir, pegawai pos, teller, agen, dan sebagainya.



Sumber : : <http://www.psis.edu.my/images/cisec/2018/>

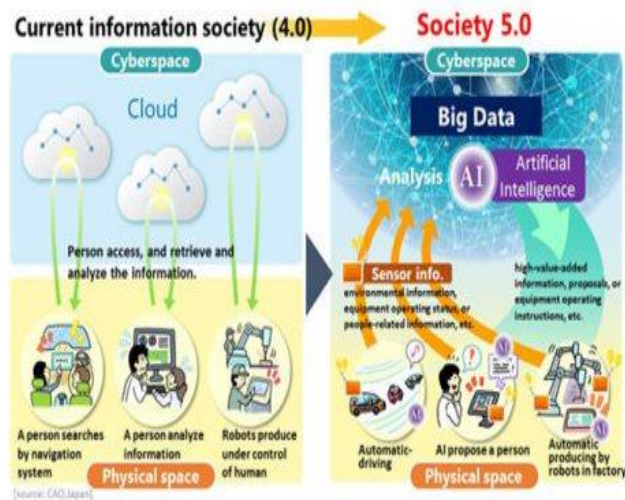
Gambar 1 : Transformasi Dari Industri 1.0 ke Revolusi Industri 4.0

Revolusi industri 1.0

berbasis mekanisasi, tenaga air dan uap, yang ditandai dengan menggantikan tenaga hewan menggunakan tenaga mesin. Revolusi industri 2.0 disebut dengan revolusi Teknologi berupa Produksi massal yang menggunakan tenaga listrik, assembly line. Revolusi industri 3.0 ini timbulnya diawali dengan adanya teknologi informasi dan elektronik yang masuk ke dalam dunia industri yaitu sistem otomatisasi berbasis komputer dan robot. Revolusi Industri 4.0 Cyber Physical Systems adalah konektivitas manusia, data, dan mesin dalam bentuk virtual

Perkembangan teknologi dan Informasi yang cepat, termasuk adanya pekerjaan manusia yang digantikan oleh kehadiran robot cerdas, dianggap dapat mendegradasi peran manusia. Hal ini yang melatarbelakangi lahirnya Society 5.0 .

Melalui konsep ini diharapkan membuat kecerdasan buatan akan mentransformasi big data yang dikumpulkan melalui internet pada segala bidang kehidupan, dengan harapan untuk meningkatkan kemampuan manusia.



Gambar 2: Society 4.0 ke Society 5.0

Sumber: https://www8.cao.go.jp/cstp/english/society5_0/index.html

Revolusi Industri 4.0 Mendorong Pemerintah Indonesia akan mencanangkan 10 prioritas nasional dalam inisiatif “Making Indonesia 4.0” Making Indonesia 4.0 memuat 10 inisiatif nasional yang bersifat lintas sektoral untuk mempercepat perkembangan industri manufaktur di Indonesia.

1. Perbaikan alur aliran barang dan material
2. Desain ulang zona industri Indonesia telah membangun beberapa zona industri di penjuru negeri.
3. Mengakomodasi standar-standar keberlanjutan (sustainability)
4. Memberdayakan UMKM
5. Membangun infrastruktur digital nasional
6. Menarik minat investasi asing
7. Peningkatan kualitas SDM
8. Pembangunan ekosistem inovasi
9. Insentif untuk investasi teknologi
10. Harmonisasi aturan dan kebijakan

Peluang dan tantangan Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0

Revolusi industri 4.0 adalah manufaktur terhubung dengan secara digital yang didukung oleh internet, big data, cloud computing dan artificial intelligence akan berdampak pada pembangunan pedesaan.

1. Pemasaran atau Penjualan produk-produk masyarakat dapat dilakukan secara digital
2. Harga gadget dan handphone semakin murah
3. Harga internet semakin terjangkau oleh masyarakat
4. Semakin banyak wirausaha UMKM menggunakan e-commerce
5. Kinerja perusahaan tidak hanya ukuran keuangan tapi juga wellbeing dari masyarakat dan pekerja misalnya . Perbankan, Fintech dan Industri pengolahan

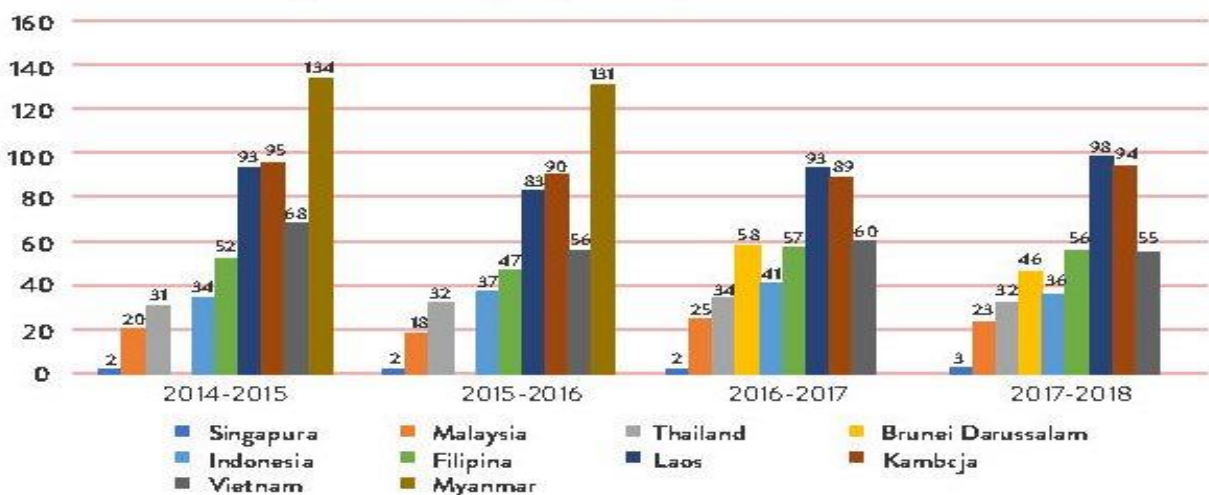
Selain itu juga ada tantangan revolusi industri 4.0 yang perlu kita hadapi, yaitu

1. Dengan digunakan robot dan komputer pintar (artificial Intelligence) banyak sektor pekerjaan yang hilang, mesin-mesin pintar menggantikan pekerjaan manusia.
2. Dampak negatif dari gadget digunakan mengakses informasi digital bermuatan negatif dan media sosial.(Hoax)
3. Persaingan yang ketat dalam perdagangan online (E-commerce)
4. Tumbuh kebutuhan untuk kerja sama dan kolaboratif
5. Meningkatnya kebutuhan akan inovasi

PEMBAHASAN

1. Daya saing UMKM Indonesia

Dalam menghadapi revolusi industri 4.0 UMKM harus memiliki daya saing global sehingga mampu berkompetisi dengan negara-negara lain, diperlukan strategi yang tepat untuk bisa memenangkan persaingan yang ketat. Posisi Indonesia Menurut World Economic Forum (WEF), peringkat daya saing global Indonesia tahun 2019 adalah 50 dari 141 negara yang disurvei. Survei peringkat daya saing global ini dilakukan setiap tahun. Pada tahun 2015 – 2016 peringkat Indonesia adalah 37, Selanjutnya untuk tahun 2017 – 2018 peringkat Indonesia mengalami Kenaikan menjadi 36. bila dibandingkan peringkat tahun 2019 mengalami penurunan peringkat. dengan demikian terjadi penurunan peringkat. Di tingkat ASEAN, peringkat Indonesia lebih baik dibanding peringkat Vietnam (55), Filipina (56), Brunei (46) dan Kamboja (94). Namun, Indonesia berada di bawah Singapura



(3), Malaysia (23), , dan Thailand (32).

Gambar 3: Tingkat Competitiveness di Asean Sumber : (Ayu, n.d.)

Dari gambar dan penjelasan diatas daya saing UMKM Indonesia relatif rendah. Rendahnya tingkat daya saing disebabkan barang-barang domestik kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. UMKM memiliki posisi yang strategis dDalam menyumbang penerimaan PDB Indonesia yang menjadi salah satu rujukan dalam menentukan pertumbuhan ekonomi nasional, kontribusi UMKM pada penerimaan negara lebih besar daripada negara-negara lain di kawasan ASEAN. UKM Indonesia mampu menyumbang 57,6 persen,

sementara UMKM di Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand berturut-turut sebesar 24; 33,1; 36; 45; dan 37,4 persen.

Namun kontribusi UMKM terhadap ekspor masih relatif lebih rendah dibandingkan Thailand dan Malaysia. UMKM di Thailand berkontribusi terhadap ekspor sebesar 25,5 persen, sedangkan Malaysia berkontribusi terhadap ekspor sebesar 19 persen, sedangkan Indonesia sebesar 15,7 persen dari total ekspor.

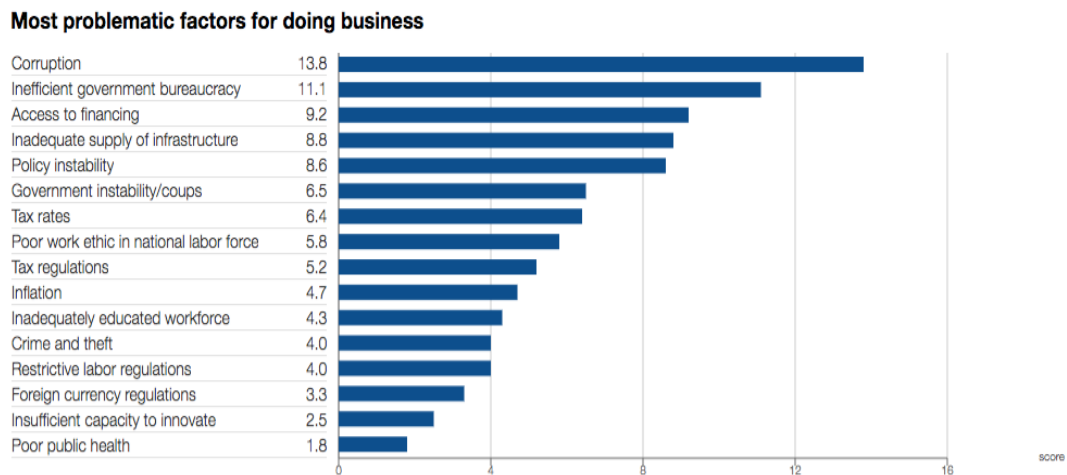
Gambar 4. Perbandingan Kontribusi UMKM Terhadap Perekonomian di Negara Asean

Negara	Unit Usaha		Penyerapan Tenaga Kerja		Kontribusi terhadap PDB		Ekspor	
	Share (%)	Tahun	Share (%)	Tahun	Share (%)	Tahun	Share (%)	Tahun
Brunei Darussalam	98.2	2010	59	2010	24	2010	n/a	n/a
Kamboja	99.8	2014	71.8	2014	n/a	n/a	n/a	n/a
Indonesia	99.9	2013	96.9	2013	57.6	2013	15.7	2013
Laos	99.8	2013	82.9	2013	n/a	n/a	n/a	n/a
Malaysia	97.3	2011	57.5	2013	33.1	2013	19	2010
Myanmar	87.4	2014	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Filipina	99.6	2012	64.9	2012	36	2006	10	2010
Singapura	99.4	2012	68	2012	45	2012	n/a	n/a
Thailand	97.2	2013	81	2013	37.4	2013	25.5	2013
Vietnam	97.7	2012	46.8	2012	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber: Asian Development Bank dan Kementerian Koperasi dan UMKM

(Sumber: Departemen Pengembangan UKM Bank Indonesia, 2016)

Tabel 1 : Faktor Penghambat Daya Saing Bisnis di Indonesia Tahun 2018



Sumber : WEF (2018) diolah

Lima Masalah utama penghambat daya saing bisnis melakukan bisnis di Indonesia adalah masalah Korupsi, Birokrasi Pemerintah yang Tidak Efisien, Akses Terhadap Pembiayaan, Infrastruktur dan Kebijakan yang tidak stabil. Hambatan paling utama menempati urutan teratas adalah korupsi sebanyak 3.8. dan urutan kedua adalah birokrasi Pemerintah. Pemerintah telah berusaha memperbaiki peringkat menurunkan tingkat korupsi dengan memperkuat peran KPK dalam memberantas

3.Strategi Pemberdayaan UMKM berbasis Kearifan Lokal

1. Peran Pemerintah dalam

Pemberdayaan UMKM

Dalam rangkai menghadapi revolusi industri 4.0 pemerintah mencanangkan Making Indonesia 4.0 memuat 10 inisiatif nasional yaitu :

1. Perbaiki alur aliran barang dan material
2. Desain ulang zona industri
3. Mengakomodasi standar-standar

- keberlanjutan
4. Memberdayakan UMKM
 5. Membangun infrastruktur digital nasional
 6. Menarik minat investasi asing
 7. Peningkatan kualitas SDM
 8. Pembangunan ekosistem inovasi
 9. Insentif untuk investasi teknologi
 10. Harmonisasi aturan dan kebijakan

Sedangkan melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika mencanangkan Rencana Strategis 2015-2019 yaitu berupa konektivitas Broadband Nasional salah satunya Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kawasan (SIDEKA) ke 1000 desa. Peranan pemerintah diharapkan mampu menggerakkan ekonomi digital dan menghadirkan suatu sistem digitalisasi yang terhubung antara para pelaku Usaha UMKM. Selain infrastruktur Kendala utama UMKM minimnya akses modal, bunga kredit yang tinggi dan akses pemasaran. Sedangkan Menurut (Tambunan, 2009) Rintangan-rintangan yang umum adalah keterbatasan modal kerja maupun investasi, kesulitan dalam pemasaran distribusi dan pengadaan bahan baku, keterbatasan akses informasi mengenai peluang pasar, kualitas SDM rendah, kemampuan teknologi, biaya transportasi, keterbatasan komunikasi, prosedur administrasi dan birokrasi yang kompleks dan ketidak pastian akibat peraturan-peraturan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi yang tidak jelas.

2. Peran Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan UMKM

Perguruan Tinggi adalah Lembaga yang berfungsi mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih memahami perubahan era revolusi industri. Dalam tri dharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, misalnya pemberdayaan UMKM agar kompetitif bersaing di era revolusi industri 4.0. Perguruan Tinggi dengan Pendidikan mampu mencerdaskan masyarakat dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dan mempersiapkan mahasiswa mampu berbaur dengan masyarakat. Melalui penelitian Perguruan tinggi bisa melaksanakan kajian-kajian mengenai permasalahan masyarakat yang dapat mensejahterakan masyarakat pedesaan. Pengabdian masyarakat oleh perguruan tinggi mengandung unsur:

1. Mengembangkan Ipteks dan seni,
2. Menyebarkan Ipteks dan seni
3. Menerapkan Ipteks dan seni
4. Memberikan bantuan keahlian kepada masyarakat
5. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat
6. Memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Perubahan ke era Revolusi Industri 4.0 telah membawa perubahan pada daya bersaing dengan produk sejenis dapat memperluas pangsa pasar, meningkatkan pendapatan, dan membuka lapangan pekerjaan baru.

pelatihan mendapatkan tambahan pengetahuan tentang produk dan produksi yang baik, kemasan produk yang komersil, jaringan pemasaran yang baru digital Revolusi Industri 4.0. pengabdian akan dilanjutkan kepada tahap pembinaan perbaikan kemasan, sehingga produk dapat dipasarkan secara digital.

3. Peran Stakholder dalam pemberdayaan UMKM

Peranan Stakholder dalam membangun kelembagaan untuk pengembangan UMKM sangat penting dalam mendorong UMKM menuju ekonomi produktif. Keterlibatan stakeholder sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pemberdayaan masyarakat untuk UMKM. Permasalahan yang dihadapi UMKM di era Revolusi Industri 4.0 telah membawa perubahan pada daya bersaing dengan produk sejenis dapat

memperluas pangsa pasar, meningkatkan pendapatan, dan membuka lapangan pekerjaan baru. pelatihan mendapatkan tambahan pengetahuan tentang produk dan produksi yang baik, kemasan produk yang komersil, jaringan pemasaran yang baru digital Revolusi Industri 4.0. pengabdian pembinaan perbaikan kemasan, sehingga produk dapat dipasarkan secara digital. Kebutuhan pemberdayaan yang dilaksanakan stakeholder harus disesuaikan dengan tantangan di era Industri 4.0 dan era society 5.0. serta memperhatikan kearifan lokal (Local wisdom) dari masyarakat tersebut. Peran stakeholder dalam membangun usaha ekonomi produktif dapat dibuat strategi fasilitasi forum dialog dalam rangka mensinergikan Stakeholder. Peran Stakeholder dalam Pengembangan Kelembagaan UMKM dapat dibuat matrik seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2 : Analisis Kebutuhan Pemberdayaan UMKM dari berbagai Stakeholder

No.	Kebutuhan Pembelajaran	Keadaan Sekarang	
1	Kemampuan Teknologi	-Diperindag dan PKM -Perguruan Tinggi -LSM -Sekolah Kejuruan,Disnaker	Pelatihan Pembinaan Pengabdian Masyarakat Bimbingan Usaha Pelatihan Kursus Magang
2	Pengetahuan Permodalan	Diperindagkop dan PKM	Pembinaan Pelatihan
3	Pengetahuan Pemasaran	Diperindagkop dan PKM	Pembinaan organisasi Pendaftaran

			Perizinan Pembinaan Niaga Kemitraan Pembinaan Koperasi
4	Peningkatan Kreativitas		Secara khusus belum ada
5	Peningkatan Prakarsa		Secara khusus belum ada
6	Peningkatan Keuletan Berusaha		Secara khusus belum ada
7	Peningkatan Keberanian Beresiko		Secara khusus belum ada
8	Peningkatan Kewirausahaan	-Diperindagkop dan PKM -Perguruan Tinggi -LSM -Disnaker	Pelatihan-pelatihan
9	Layanan Permodalan	-Perbankan -BUMN	Promosi proyek
10	Peningkatan Kualitas dan Pengembangan SDM	-Diperindagkop dan PKM -Perguruan Tinggi -Disnaker	Pelatihan Pembinaan
11	Perluasan Pasar	-Diperindagkop dan PKM -Perguruan Tinggi	Pelatihan Pembinaan

Sumber : (Karsidi, 2007)

Berikut dijelaskan pola interaktif hubungan antar peran masing-masing stakeholder UKM yang diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi kemajuan UKM:

1. UKM

UKM sebagai pelaku utama yang sangat penting dalam rangka pemberdayaan mereka sendiri. Pemberdayaan UKM diberikan motivasi dan manfaat dari berbagai peluang dan fasilitas yang diberikan oleh stakeholder.

2. Kelompok/Koperasi

Dengan Koperasi diharapkan bisa memperkuat koperasi dalam mendapatkan bahan baku, proses produksi, maupun penjualan produk. Dan berbagai fasilitas yang tersedia

bagi lembaga koperasi akan dapat dirasakan oleh para anggotanya.

3. Asosiasi Usaha

Asosiasi usaha dapat membantu UKM dalam berbagai aspek bagi anggotanya terutama kaitannya dengan pasar akan memperkuat posisi tawar dalam perdagangan, baik dalam penetapan harga maupun sistem pembayaran dan menciptakan persaingan usaha yang sehat.

4. Lembaga Keuangan (Bank dan Non Bank)

Salah satu masalah pemberdayaan UKM adalah masalah kekurangan modal, Bank dapat mempermudah memperoleh modal.

5. Pasar

Pasar perdagangan produksi UKM dapat berupa pasar dalam negeri (domestik) maupun pasar ekspor. Dalam hal ini dapat difasilitasi oleh pemerintah, perguruan tinggi/LSM/Swasta, maupun Asosiasi usaha.

6. Pemerintah

Peran pemerintah dalam mengembangkan UKM maupun lembaga lain yang terkait dengan pemberdayaan UKM seperti koperasi, Asosiasi, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Keuangan, dapat diwujudkan dengan kebijakan yang berpihak terhadap pengembangan usaha UKM.

7. Perguruan Tinggi

Perguruan Tinggi memiliki peran sebagai konsultan pengembang usaha dalam berbagai aspek, yaitu, manajemen, produksi, pasar dan pemasaran.

4. KESIMPULAN

Tingkat Daya saing Indonesia mengalami penurunan di tahun 2018 ini akan berakibat pada pelambatan perkembangan UMKM dan hambatan-hambatan paling tinggi adalah tingkat korupsi dan Birokrasi Pemerintah. Pemerintah telah berusaha memperbaiki dengan melakukan kebijakan-kebijakan efisiensi birokrasi dan memperkuat peran KPK. Hadirnya revolusi Industri 4.0 yang menyebabkan manufaktur terhubung secara digital yang ditopang oleh empat unsur, yaitu internet of things, big data, cloud computing, dan artificial intelligence. Perdagangan

barang akan mengarah ke ekonomi digital. Sangat mendesak memberdayakan UMKM agar dapat bersaing secara global. Diperlukan strategi pemberdayaan yang dibutuhkan peran Pemerintah, Peran Perguruan Tinggi dan Peran Stakholder dalam mengembangkan pemberdayaan UMKM menuju ekonomi produktif. Sinerginitas antar stakeholder maupun darmeningkatkan daya saing UMKM diharapkan berkerjasama antar UMKM dan berkerjasama dengan stakeholder UMKM sendiri diharapkan mampu menjadi UMKM yang modern dan dapat bersaing di era revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0.

REFERENSI

Artikel Jurnal

- Adithya Prabowo. (2019). Ekonomi mingguan. In *Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian*. Jakarta.
- Eko, S. (2002). Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Pemberdayaan Masyarakat, I(2)*, 87–99.
- Tumanggor, R. (2007). Pemberdayaan Kearifan Terpencil. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, 12(01)*, 1–17Lokal Memacu Kesetaraan Komunitas Adat

Buku

- Ayu, N. A. K. (n.d.). *Persaingan Industri 4.0 di Asean Dimana*

Posisi Indonesia. Yogyakarta:
Forbil Institute.

Hidayat N, R. (2017). *Dinamika
Perubahan*. Sidoarjo: Zifatama
Publisher.

Rahman Mulyawan. (2012).
Masyarakat, wilayah dan
pembangunan. In *UNPAD Press*.
Bandung: UNPAD Press.

Ronald J. Hustedde. (2009). *An
Introduction to
Community Development*. London:
Routledge.

Tambuan, T. T. H. (2009). *UMKM di
Indonesia*. Jakarta: Ghalia
Indonesia.

Wrihatnolo, R. R., & Riant nugroho

Dwidjowijoto. (2007).
*Manajemen Pemberdayaan
Sebuah Pengantar dan Panduan
untuk Pemberdayaan masyarakat*.
Jakarta: Elex Media Komputindo.

Prosiding Seminar

Piutanti, R. (2015). PEMAKNAAN
KEMBALI KEARIFAN
LOKAL DALAM
ARSITEKTUR (Keterkaitan
Manusia, Budaya dan Alam
Nusantara). *SEMINAR
NASIONAL :2015 “Finding
The Fifth Element... After
Water, Earth, Wind, and Fire”
Local Wisdom and Cultural
Sustainability* PEMAKNAAN.
Jakarta.